



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARBANI MUKTI WIBOWO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **430881**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.336.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m²/200 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.760.000.000
2. Tanah Seluas 140 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 126.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.5 m²/1 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **295.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, HONDA ODYSSEY MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI NINJA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **450.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **902.146.557**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **3.533.596.557**

III. HUTANG Rp. **729.685.719**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **2.803.910.838**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.